

DAFTAR PUSTAKA

1. Peraturan Perundang-undangan

- Pemerintah Republik Indonesia. (2014). *Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah*.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2020). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah*.
- Kementerian Keuangan. (2014). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 150/PMK.06/2014 Tentang Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara*.
- Kementerian Keuangan. (2021). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 153/PMK.06/2021 Tentang Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara*.
- Kementerian Keuangan. (2020). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 172/PMK.06/2020 Tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara*.
- Kementerian Keuangan. (2020). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 184/PMK.01/2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak*.

2. Sumber Lainnya

- Tim Dosen PKN STAN. (n.d). *Pengelolaan Barang Milik Negara*.
- Margono. (2016). *DTSS Pengelolaan Barang Milik Negara Bagi Pengguna Barang: Materi Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara*. Jakarta:Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.
- Ningsih, A.R., & Mardjoeki. (2020). *Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara Tingkat Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB): Teknis Substantif Perencanaan Barang Milik Negara*. Jakarta: Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM.
- CNN Indonesia. (2021). Indonesia Umumkan Pasien Pertama Positif Covid-19 Varian Omicron. Diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211216104724-20-734763/indonesia-umumkan-pasien-pertama-positif-covid-19-varian-omicron>. (diakses pada 27 April 2022, 19:35 WIB)

- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2021). *Pengelolaan Aset BMN Maksimal, Manfaat Sebesar-besarnya untuk Masyarakat*. Diakses dari <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/pengelolaan-aset-bmn-maksimal-manfaat-sebesar-besarnya-untuk-masyarakat/>. (diakses pada 27 April 2022, 20:40 WIB)
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2015). *Pentingnya Perencanaan Kebutuhan BMN dalam Pengelolaan BMN*. Diakses dari <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/berita/baca/8952/Pentingnya-Perencanaan-Kebutuhan-BMN-dalam-Pengelolaan-BMN.html>. (diakses pada 27 April 2022, 22:50 WIB)
- KPP Pratama Kudus. (n.d). *Visi, Misi, Tujuan, dan Maklumat Pelayanan*. Diakses dari <https://pajak.go.id/id/visi-misi-tujuan-dan-maklumat-pelayanan>. (diakses pada 30 April 2022, 19:53 WIB)
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2021). *Pemerintah Terus Upayakan Pemulihan Ekonomi, Namun Tetap Waspada Terhadap Pandemi Covid*. Diakses dari <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/pemerintah-terus-upayakan-pemulihan-ekonomi-namun-tetap-waspada-terhadap-pandemi-covid/>. (diakses pada 30 April 2022, 20:38 WIB)
- Wildan, M. (2020). *KPP Pratama Dibagi Jadi Dua Kelompok, Ini Kata DJP*. Diakses dari <https://news.ddtc.co.id/kpp-pratama-dibagi-jadi-dua-kelompok-ini-kata-djp-26009>. (diakses pada 1 Mei 2022, 10:33 WIB)
- Hoesada, Jan, & Ling, Mei. (2014). *Barang Milik Negara/Daerah*. Diakses dari <https://www.ksap.org/sap/barang-milik-negaradaerah/>. (diakses pada 1 Mei 2022, 12:25 WIB)
- BAPPEDA Kabupaten Kudus. (2021). *Kondisi Geografis Kabupaten Kudus*. Diakses dari <https://bappeda.kuduskab.go.id/profil-kudus.php>. (diakses pada 1 Mei 2022, 12:55 WIB)